



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.253-Org/V/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 59 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 58 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 62 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 66 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 14 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 71 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 73 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 74 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 38 Seri D);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 77 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 83 Seri D);

21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 95 Seri D);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 96 Seri D);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 92 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 060/439/SETDA.Org tanggal 14 April 2021 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450.Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI****NOMOR : 060/Kep.253-Org/V/2021****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI****JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

No.	JENIS PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. IMB pembangunan bangunan gedung baru; b. IMB rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan dan perubahan; c. IMB pelestarian/pemugaran bangunan gedung; d. IMB pembangunan prasarana bangunan gedung; e. IMB rehabilitasi prasarana bangunan gedung; f. IMB Pemutihan.
2.	Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	JENIS PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
3.	Izin pengelola parkir kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta : a. Izin penyelenggaraan parkir elektronik dengan palang pintu b. Izin penyelenggaraan valet parkir c. Izin Penitipan Motor d. Izin penyelenggaraan parkir tidak berbayar	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meliputi: gedung, lahan di luar badan jalan
4.	Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Izin Praktek Dokter	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6.	Izin Optikal	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7.	Izin Salon Kecantikan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8.	Izin Pengobatan Tradisional	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9.	Izin Penyelenggaraan Tukang gigi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
10.	Izin Praktek Bidan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11.	Izin Praktek Perawat	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.	Izin Praktek Apoteker	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	JENIS PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
13.	Izin Praktek Asisten Apoteker	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14.	Izin Praktek Perawat Gigi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint	
15.	Izin Praktek Analis Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16.	Izin Praktek Gizi/Nutrisionist	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
17.	Izin Praktek Teknisi Sanitarian	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
18.	Izin Praktek Fisioterapi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19.	Izin Praktek Radiografer	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
20.	Izin Praktek Perekam Medis	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
21.	Izin Praktek Elektromedik	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
22.	Izin Praktek Kardiovaskuler	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23.	Izin Praktek Transfusi Darah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	Izin Praktek Terapis Wicara	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	JENIS PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
25.	Izin Praktek Refraksionis Optisien	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
26.	Izin Praktek Okupasi Terapi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
27.	Izin Praktek Akupuntur	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
28.	Izin Praktek Penata Anastesi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
29.	Izin Praktek Psikologi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
30.	Izin Praktek Dokter Hewan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
31.	Izin Rumah Potong Hewan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
32.	Izin Usaha Veteriner	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
33.	Izin Praktek Paramedik Veteriner	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
34.	Izin Pelaku Teknik Bangunan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
35.	Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI****NOMOR : 060/Kep.253-Org/V/2021****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI****JENIS-JENIS NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Kepala Dinas Sosial	
2.	Rekomendasi Pengangkatan Anak	Kepala Dinas Sosial	
3.	Surat Keterangan Memimpin Sekolah Swasta	Kepala Dinas Pendidikan	
4.	Legalisir Ijazah	Kepala Dinas Pendidikan	
5.	Rekomendasi Pindah Rayon SD dan SMP	Kepala Dinas Pendidikan	
6.	Rekomendasi Pengelolaan MCK di dalam Pasar	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
7.	Rekomendasi Penyelenggaraan Pasar Lingkungan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
8.	Surat Keterangan Asal (SKA)	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
9.	SPPT PBB	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Khusus data baru
10.	SK Pembetulan PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
11.	Surat Keterangan NJOP	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
12.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Untuk jenis pajak reklame dan pajak air tanah
13.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
14.	NPWPD	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kartu baru
15.	Surat Keterangan Penelitian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
16.	Rekomendasi Pemberian Bantuan Keuangan Pada Partai Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
17.	Rekomendasi Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
18.	Surat Keterangan Keberadaan Ormas/LSM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19.	Surat Pertimbangan Perizinan Rumah Ibadah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
20.	Surat Keterangan Wajib Lapor Orang Asing	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
21.	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Kepala Dinas Kesehatan	
22.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang	Kepala Dinas Kesehatan	
23.	Rekomendasi Operasional Pest Control	Kepala Dinas Kesehatan	
24.	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi	Kepala Dinas Kesehatan	
25.	SK Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
26.	SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
27.	Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja (SP)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
28.	Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
29.	Pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
30.	Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
31.	Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja (PPJP)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
32.	Bukti Pekerjaan Penunjang	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
33.	Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
34.	Kartu Ak.I/Kartu Kuning (Pembuatan dan Perpanjangan)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
35.	Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
36.	Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
37.	Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
38.	Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
39.	Rekomendasi Perubahan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
40.	Surat Keterangan Perkawinan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
41.	Pencatatan Pengesahan Anak	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
42.	Pencatatan Pengakuan Anak	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
43.	Surat Keterangan Belum Menikah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
44.	Surat Keterangan Numpang Nikah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
45.	Kutipan Kedua Akta Kematian	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
46.	Akta Kelahiran	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
47.	Surat Pindah Kewarganegaraan Indonesia	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
48.	Kartu Tanda Penduduk	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
49.	Kartu Keluarga	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
50.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
51.	Sertifikat Laik Fungsi	Kepala Dinas Tata Ruang	
52.	Pertelaan Bangunan Apartemen	Kepala Dinas Tata Ruang	
53.	Rekomendasi Pemakaian/Sewa Alat Berat	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
54.	Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Jalan	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
55.	Persetujuan Alokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
56.	Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
57.	Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
58.	Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
59.	Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
60.	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
61.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
62.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
63.	Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
64.	Rekomendasi Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
65.	Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
66.	Rekomendasi Izin Usaha Produsen, Importir, Eksportir dan Distributor Obat Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
67.	Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
68.	Rekomendasi Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
69.	Rekomendasi Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
70.	Tanda Daftar Usaha Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
71.	Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	

No.	JENIS NON PERIZINAN	YANG MENANDATANGANI	KETERANGAN
72.	Berita Acara Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	
73.	Surat Keterangan Rujukan	Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid	

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

